

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

- Abdul Majid, 2007, *Syariat Islam dalam Realita Sosial*, Yayasan PeNA dan Ar-Raniry Pers , Banda Aceh.
- Achmad Gunaryo, 2006, *Pergumulan Politik & Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Al Yasa' Abubakar, 2004, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan)*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
- _____, 2005, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh.
- Al Yasa Abubakar dan Marah Halim, 2006, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh.
- A Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamid Sarong, Hasnul Arifin Melayu, 2012, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintasan Sejarah dan Eksistensinya)*, Global Education Institute, Banda Aceh.
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusamedia, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ridwan M Hasan, 2013, *Modernisasi Syariat Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.

Syahrizal Abbas, 2015, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Filosofi Hukum Jinayah di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura.

Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Misir (Perjudian).

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam.

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Uqubath Cambuk.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 Tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Website

<http://www.badilag.net/arsip/130-tahun-pa/buku-yang-diterbitkan/11917-sejarah-dan-perkembangan-mahkamah-syariah-di-aceh.html>, diakses pada 30 Juni 2016.

<http://qanunjinayahdiaceh.blogspot.com/2011/04/pemberlakuan-qanun-jinayah-di-aceh.html>, di akses pada tanggal 5 Maret 2017.

<https://marisa178.wordpress.com/2016/12/26/mahkamah-syariah-di-nangroe-aceh-darussalam/> Di akses pada 06-05-2017

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20724/mengurai-tumpang-tindih_wewenang-mahkamah-syariah-dan-pengadilan-negeri.Diakses pada 8 Agustus 2017.

<http://www.ms-aceh.go.id/> di akses pada 10 Agustus 2017.